

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 32 TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN  
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

**CETAK BIRU**  
**SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH**

---

**I. PENDAHULUAN**

Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu unit kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tugas utama melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah. Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai salah satu misi yaitu “Melaksanakan Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah secara Berkualitas”. Salah satu instrumen penting yang dapat digunakan dalam mewujudkan misi tersebut adalah Teknologi Informasi. Sistem dan manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi diharapkan mampu memberikan dukungan bagi pengelolaan keuangan daerah. Termasuk di dalamnya pengambilan keputusan strategis secara cepat, tepat, akurat dan efisien. Selain hal tersebut diatas, terus meningkatnya kompleksitas pengelolaan keuangan daerah, lahirnya regulasi pengelolaan keuangan daerah yang baru, serta terus meningkatnya kerjasama keuangan daerah, membuat

semakin besarnya tuntutan akan akses informasi dan komunikasi yang handal.

Menghadapi tantangan dan tuntutan organisasi baik yang datang dari dalam maupun dari luar organisasi, maka perlu disiapkan perencanaan dan langkah-langkah strategis. Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi sesungguhnya tidak ada lagi hambatan ruang dan waktu. Paradigma Sistem Informasi yang tertutup dan berdiri sendiri sudah saatnya dihilangkan dan diganti dengan paradigma keterbukaan informasi dan integrasi data.

## **II. VISI**

***“TERWUJUDNYA TATA KELOLA PENGELOLAAN KEUANGAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL”***

## **III. MISI**

1. Melaksanakan Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah Secara Berkualitas
2. Melaksanakan Pengelolaan Daerah Secara Konsisten
3. Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

## **IV. TUJUAN**

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel
2. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah
3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas APBD Kabupaten dan Kota

## **V. ISU STRATEGIS**

1. Kompleksitas pengelolaan keuangan daerah yang disebabkan oleh bisnis proses dan regulasi pengelolaan keuangan daerah volume anggaran keuangan daerah.

2. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan daerah dari seluruh OPD Provinsi Sumatera Barat
3. Konsistensi dan akurasi penyajian laporan pengelolaan keuangan.
4. Dukungan Sistem Informasi dalam pengelolaan keuangan daerah
5. Integrasi sistem informasi dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Daerah.

## **VI. SASARAN**

1. Pada akhir tahun 2023 Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terpadu telah mensinergikan Sistem Informasi Perencanaan (Sakato Plan), Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah (Simbada), Sistem Informasi e-ktp, Sistem Informasi e-Samsat, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD).
2. Pada akhir tahun 2023 Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu rujukan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.
3. Pada akhir tahun 2023 Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki infrastruktur Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memadai.
4. Pada akhir tahun 2023 Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat mampu bersinergi dan meningkatkan kualitas jalinan kerjasama dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Barat.

## **VII. KEBIJAKAN UTAMA**

1. Strategi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi didasarkan atas kebijakan sentralisasi sistem dan desentralisasi kewenangan.

2. Arah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi mengikuti kebijakan taat azas dan jaminan keamanan dengan memanfaatkan perangkat legal.
3. Tahapan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi didasarkan pada kebijakan keterpaduan dan keseluruhan.
4. Strategi kerjasama Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sinergitas dan mutualisme.

## **VIII. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR**

Pengembangan infrastruktur harus diarahkan pada integrasi sistim informasi. Integrasi diperlukan karena layanan sistim informasi keuangan digunakan oleh seluruh OPD Provinsi Sumatera Barat yang secara geografis tersebar di berbagai lokasi di dalam Kota Padang dan sebagian yang lain berada di luar Kota Padang. Untuk mengakomodir kebutuhan jaringan bagi OPD, insfrastruktur jaringan yang tersedia saat ini adalah :

- a. Jaringan komunikasi untuk OPD di dalam Kota Padang saat ini digunakan jaringan VPN melalui frekuensi radio lebih kurang 50 titik dengan banwitdh sampai dengan 100 Mbps.
- b. Jaringan komunikasi untuk OPD diluar kota Padang digunakan VPN dari penyedia jasa jaringan PT. Telkom Indonesia sekitar 40 titik dengan bandwitdh sampai dengan 1 Mbps.
- c. Disamping itu juga telah digunakan jaringan GSM Telkonsel untuk pelayanan bergerak dan jaringan cadangan pada Badan Keuangan Daerah sebanyak 40 titik dengan bandwidth sampai dengan 256 Kbps.

Kebutuhan infrastruktur jaringan internet dipenuhi dari 2 (dua) sumber yaitu:

- a. Penyedia jasa internet (internet provider) yaitu PT.Biznet sebesar 20 Mbps
- b. Sharing internet Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat sebesar 5 Mbps.

Infrastruktur perangkat keras sebagian besar telah tersedia dengan perincian sebagai berikut :

- a. *server (Dell Poweredge R730, R720, R710)*
- b. *Personal Computer (Core15, corei7)*
- c. *Router (microtic, cisco, fortiget)*
- d. *Switch/hub*
- e. *Power Supply (15 KVA Scheinider)*
- f. *Storage (24 TB HP)*
- g. *KVM*
- h. *Genset*

Seluruh perangkat keras sistim informasi tersebut terlokalisir pada ruangan server ukuran 6 x 4 meter berlokasi di Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Jalan Khatib Sulaiman No.43 Padang.

**a. Rencana Pengembangan Jaringan**

**RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN**

No.	JARINGAN	TAHUN
1	Penambahan bandwitdh 20 MBps (VPN-IP) Penguatan akses wireless kantor pusat dan	2019
2	UPT <i>Upgrade backbone</i> jaringan internal kantor	2020
3	pusat ke FO	2021
4	Integrated Sistim Informasi	2022
5	Upgrade backbone jaringan OPD ke FO	2023

**b. Rencana Pengembangan Kapasitas Internet**

**RENCANA PENGEMBANGAN KAPASITAS INTERNET**

No.	KAPASITAS BANDWIDTH	TAHUN
1	35 Mbps	2019
2	50 Mbps	2020
3	60 Mbps	2021

4	70 Mbps	2022
5	80 Mbps	2023

**c. Rencana Pengembangan perangkat keras**

**RENCANA PENGEMBANGAN HARDWARE**

No.	HARDWARE	TAHUN
1	<i>Dual homing</i> jaringan menuju server Penarikan server UPT <i>Cloud server</i>	2019
2	Server <i>backup</i> SIPKD <i>Storage dan memory server upgrade</i>	2020
3	<i>Smart data center FO based</i>	2021
4	<i>Command centre building</i>	2022
5	<i>Upgrade blade server</i>	2023

**IX. PENGEMBANGAN SISTEM DAN AKSES LAYANAN**

Pengembangan Sistem Informasi pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat mengedepankan prinsip integrasi sistim, layanan prima. Oleh karena itu diperlukan langkah nyata untuk mewujudkannya. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

**a. Keterpaduan Sistim Informasi, Basis Data dan Warehouse.**

Tuntutan sistim informasi terintegrasi adalah suatu kemutlakan. Idealnya sistim informasi dan komunikasi mempermudah pekerjaan. Namun hanya karena integrasi belum dilakukan maka pekerjaan yang dihasilkan dari sistim informasi tetap memerlukan pengolahan data manual yang pada akhirnya memberikan beban tambahan kepada manusia sebagai pengguna. Selain itu, tanpa sistim terintegrasi maka tidak ada jaminan data yang sama untuk seluruh keluaran sistim informasi (konsistensi data)

Dengan sistem informasi yang terintegrasi, seluruh proses pengelolaan data diharapkan akan menjadi lebih efektif, efisien, transparan serta mampu menekan hal-hal negatif yang menghambat proses pengelolaan data dan informasi. Demikian juga kecepatan arus informasi dalam mendukung pengambilan keputusan (decision support system) akan sangat efektif dalam era kepemimpinan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

**b. Akses Layanan Untuk Semua**

Teknologi informasi dan komunikasi pada prinsipnya adalah untuk seluruh unsur Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu perlu ada prioritas pelayanan bagi semua dan akses bagi semua. Akses ini tidak berarti bahwa seluruh pengguna adalah konsumen namun juga berperan sebagai produsen dan konten sistem informasi dan komunikasi yang dibangun. Artinya seluruh pengguna adalah sumber data dan berperan aktif dalam kemutakhiran data dan informasi pada sistem informasi yang disediakan. Dalam pelaksanaannya ada 4 (empat) level layanan inti dan satu layanan pendukung. Layanan inti ini saling bertumpu dimana layanan pada level yang lebih tinggi bertumpu pada layanan yang lebih rendah. Layanan tersebut terdiri dari :

Layanan inti level 1 : Layanan akses dan infrastruktur fisik

1. *Router;*
2. *Local Area Network;*
3. *Wide Area Network;*
4. *Network Operation Centre;*
5. *Data Centre;*
6. *Network Storage Centre;*
7. *Internet Connection;*
8. *Computer Support Centre;*
9. *Data Security System; dan*

*10. Technical Support Computer and Network;*

Layanan inti level 2 : Layanan komputasi dan komunikasi yaitu komputasi dan pemograman, aplikasi dasar dan komunikasi/internet

- 1. Publishing, printing, word processing, spreadsheet;*
- 2. Web hosting service;*
- 3. Content management system;*
- 4. Email service;*
- 5. Logger system;*
- 6. Official website;*
- 7. Voice over IP (VOIP);*
- 8. Internet Facsimile;*
- 9. Messenger system; dan*
- 10. Video Conference System*

Layanan inti level 3 : Layanan aplikasi seperti realisasi APBD, penerbitan SP2D, SP2D online dan aplikasi pendukungnya

Layanan inti level 4 : Layanan konten dan informasi

1. Sistem Informasi SIPKD
2. Sistem Informasi e-Samsat

Layanan pendukung user care, untuk memperoleh, memelihara dan mengembangkan pelaku/pemakai layanan (helpdesk/call centre/costumer care). Adapun rencana realisasi dan pengembangan sistem informasi dari tahun ke tahun dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
SIPKD**

No.	HARDWARE	TAHUN
1	Integrasi Sakato Plan	2019
2	Integrasi e-Samsat	2020

3	Integrasi e-monev	2021
4	Integrasi e-kepegawaian	2022
5	Integrasi e-KTP	2023

Walaupun dalam penyajian layanan sistem informasi dan infrastrukturnya memerlukan biaya, layanan dasar teknologi informasi dan komunikasi di Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat harus dapat dinikmati oleh seluruh pengguna tanpa biaya. Layanan dasar adalah layanan minimum yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah. Seluruh pengguna harus dipicu dan didorong untuk menggunakan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang ada untuk kebutuhan institusi, korporasi dan komunitas.

Selain untuk memenuhi kebutuhan organisasi, pembiasaan penggunaan teknologi informasi dalam keseharian akan dapat membantu organisasi mencapai 'paperless' administrasi sehingga layanan akan lebih cepat dan 'sustainable' membangun organisasi sebagai 'cyber office' yang mana hal ini dapat dijadikan indikator dikuasainya IT di Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Layanan yang disediakan tidak terbatas pada layanan dasar. Pada prinsipnya kebutuhan seluruh organisasi dapat dilayani dalam Cyber Office termasuk kebutuhan khusus yakni yang dibutuhkan oleh sebuah kelompok dalam komunitas.

### **c. Pengembangan Konten**

Pada prinsipnya informasi yang disajikan dalam Cyber Office Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat datang dari berbagai sumber. Pengelola Cyber Office Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat menangani kandungan informasi resmi.

Adakalanya informasi yang dibutuhkan ada diluar Cyber Office Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat sehingga harus diambil menggunakan jaringan internet. Kapasitas internet saat ini diharapkan masih dapat mencukupi. Namun dalam 3 tahun kedepan akan dirasakan kekurangannya. Oleh karena itu Badan Keuangan Daerah akan mengembangkan konten lokal yang mana secara prinsip kandungan informasi yang dibutuhkan organisasi harus tersedia secara lokal dalam Cyber Office Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dicapai dengan menggalakan pembuatan muatan konten lokal itu sendiri.

Adanya data center adalah salah satu upaya yang dilakukan UPTD Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk menekan/mengurangi akses internet. Diharapkan dengan adanya data centre, pengguna mengakses lokal konten Cyber Office Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat terlebih dahulu sebelum mencarinya diluar Cyber Office Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## **X. PENUTUP**

Demikian dokumen perencanaan ini dibuat untuk dapat dijadikan referensi dan panduan dalam melakukan pengembangan sistem informasi pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Evaluasi dan penyesuaian dalam perencanaan ini akan dilakukan secara berkala jika dalam perjalanannya diperlukan penyempurnaan perencanaan ataupun perubahan kebutuhan organisasi yang harus diakomodir.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO